BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara geografis wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbasis pada pengembangan di sektor ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Kondisi ini ditunjang dengan suatu kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Strategi pembangunan yang berorientasi pada pengembangan sektor pertanian di pedesaan merupakan langkah konkrit mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan merata.[1] Di daerah pedesaan sebenarnya terdapat sumber daya manusia yang jumlahnya tak terhingga yang meliputi (wujudnya) berupa kepemimpinan, organisasi, energi, keterampilan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat dan harus dimanfaatkan untuk mengelola, memanfaatkan dan memelihara sumber daya-sumber daya lain yang banyak sekali terdapat di pedesaan seperti kekayaan alam, modal, dan teknologi. Untuk menggarap semua itu, dibutuhkan suatu tingkat keahlian dari unsur manusianya. Keahlian dan keterampilan tenaga kerja dapat dilakukan melalui pengadaan pendidikan baik bersifat pendidikan formal maupun non formal,

[1] Nano Prawoto, "Model Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kemandirian Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Dan Ketahanan Pangan (Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pada Masyarakat Dieng Di Propinsi Jawa Tengah)", *Organisasi dan Manajemen*, Nomor 2 (September, 2012), 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latihan kerja, peningkatan disiplin. Dari sini nantinya diharapkan dapat dihasilkan tenaga kerja yang berkualitas.[2]

Dalam semua negara sedang berkembang khususnya Indonesia yang berorientasi pada ekonomi pasar, para petani merupakan kelompok pekerja yang terpenting. Tetapi petani juga merupakan masalah pembangunan yang benar-benar sulit. Petani jika berusahatani secara individu terus berada di pihak yang lemah karena petani secara individu akan mengelola usaha tani dengan luas garapan kecil dan terpencar serta kepemilikan modal yang rendah. Sehingga, pemerintah perlu memperhatikan penguatan peran kelembagaan lewat kelompok tani karena dengan berkelompok maka petani tersebut akan lebih kuat, baik dari segi kelembagaannya maupun permodalannya.[3] Namun tidak mudah untuk mengikutsertakan mereka dalam kemajuan ekonomi dan sosial. Dan karena jumlah petani yang sangat banyak tersebut, tidak mungkin untuk melibatkan petani ke dalam usaha pemerintah untuk memajukan petani.[4] Oleh sebab itu, diperlukan sebuah wadah atau tempat bagi para petani untuk dapat menyalurkan potensi yang dimilikinya secara bersama-sama yaitu dengan membentuk kelompok tani.

Kelompok tani pada dasarnya adalah organisasi non formal di pedesaan yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani. Kelembagaan pertanian adalah norma atau kebiasaan yang terstruktur dan terpola serta dipraktekkan terus menerus untuk memenuhi kebutuhan anggota

---

[2] Prayitno Hadi, *Pembangunan Ekonomi Pedesaan,* (Yogyakarta: BPFE, 1987) 154.

[3] Wedy Nasrul, "Pengembangan Kelembagaan Pertanian Untuk Peningkatan Kapasitas Petani Terhadap Pembangunan Pertanian", *Menara Ilmu*, No.29 (Juni, 2012), 168

[4] Ulrich Planck, Sosiologi Pertanian (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), hal. 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat yang terkait erat dengan penghidupan dari bidang pertanian di pedesaan. Dalam kehidupan komunitas petani, posisi dan fungsi kelembagaan petani merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial atau *social interplay* dalam suatu komunitas. Kelembagaan pertani juga memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis di pedesaan. Untuk itu segala sumberdaya yang ada di pedesaan perlu diarahkan atau diprioritaskan dalam rangka peningkatan profesionalisme dan posisi tawar petani (kelompok tani). Saat ini potret petani dan kelembagaan petani di Indonesia diakui masih belum sebagaimana yang diharapkan.

Untuk menunjang kebutuhan pertanian di Indonesia, perlu halnya melakukan pengkajian mengenai kendala yang dialami oleh petani dan kelembagaan petani di Indonesia. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi kendala bagi para petani dan kelembagaan petani di Indonesia:

1. Masih minimnya wawasan dan pengetahuan petani terhadap masalah manajemen produksi maupun jaringan pemasaran.
2. Belum terlibatnya secara utuh petani dalam kegiatan agribisnis. Aktivitas petani masih terfokus pada kegiatan produksi (*on farm*).
3. Peran dan fungsi kelembagaan petani sebagai wadah organisasi petani belum berjalan secara optimal.

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas perlu melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diharapkan dapat melindungi *bargaining position* petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usaha tani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani. Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan pembangunan pertanian di pedesaan.[5]

Kelembagaan petani (kelompok tani) mempunyai fungsi sebagai wadah proses pembelajaran, wahana kerja sama, unit penyedia sarana dan prasarana produksi, unit produksi, unit pengolahan dan pemasaran, serta unit jasa penunjang. Kelembagaan dapat berbentuk kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau koorporasi. Kelembagaan difasilitasi dan diberdayakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. Dengan adanya kelompok tani, para petani dapat bersama-sama memecahkan permasalahan yang antara lain berupa pemenuhan sarana produksi pertanian, teknis produksi dan pemasaran hasil. Di antara berbagai permasalahan sosial yang ada, kelembagaan merupakan salah satu faktor yang perlu dicermati untuk mengetahui kelembagaan yang perlu mendapatkan prioritas berkaitan dengan upaya meningkatkan usaha tani khususnya padi. Oleh karena itu, kelompok tani perlu dibina dan diberdayakan

[5] Ibid., 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih lanjut agar dapat berkembang secara optimal mengingat pada semakin kompleknya permasalahan sosial dalam pengembangan pertanian akhir-akhir ini yang disadari sebagai faktor yang menentukan keberhasilan adopsi teknologi di tingkat pertanian.

Kelembagaan petani di desa umumnya tidak berjalan dengan baik ini disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

1. Kelompok tani pada umumnya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk memudahkan pengkoordinasian apabila ada kegiatan atau program pemerintah, sehingga lebih bersifat orientasi program, dan kurang menjamin kemandirian kelompok dan keberlanjutan kelompok.
2. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelompok masih relatif rendah, ini tercermin dari tingkat kehadiran anggota dalam pertemuan kelompok rendah (hanya mencapai 50%)
3. Pengelolaan kegiatan produktif anggota kelompok bersifat individu. Kelompok sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama, sehingga kegiatan produktif individu lebih menonjol. Kegiatan atau usaha produktif anggota kelompok dihadapkan pada masalah kesulitan permodalan, ketidakstabilan harga dan jalur pemasaran yang terbatas.
4. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis *social capital* setempat dengan prinsip kemandirian lokal, yang dicapai melalui prinsip keotonomian dan pemberdayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan konsep cetak biru (*blue print approach*) yang seragam. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.
6. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan berdasarkan pendekatan yang *top down*, menyebabkan tidak tumbuhnya partisipasi masyarakat.
7. Kelembagaan-kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, bukan ikatan vertikal. Anggota suatu kelembagaan terdiri atas orang-orang dengan jenis aktivitas yang sama. Tujuannya agar terjalin kerjasama yang pada tahap selanjutnya diharapkan daya tawar mereka meningkat. Untuk ikatan vertikal diserahkan kepada mekanisme pasar, dimana otoritas pemerintah sulit menjangkaunya.
8. Meskipun kelembagaan sudah dibentuk, namun pembinaan yang dijalankan cenderung individual, yaitu hanya kepada pengurus. Pembinaan kepada kelompok tani memang lebih murah, namun pendekatan ini tidak mengajarkan bagaimana meningkatkan kinerja kelompok misalnya, karena tidak ada *social learning approach*.
9. Pengembangan kelembagaan selalu menggunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Struktural organisasi dibangun lebih dahulu, namun tidak diikuti oleh pengembangan aspek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya, meskipun wadahnya sudah tersedia.[6]

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian, Nomor: 273/Kpts/OT.160/4/2007, tanggal 13 April 2007, tentang Pembinaan Kelembagaan Petani. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Untuk mewujudkan pertanian tangguh dalam pemantapan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani diperlukan dukungan sumber daya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang dapat mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan). Sehubungan dengan itu perlu dilakukan pembinaan dalam rangka penumbuhan dan pengembangan kelompok tani menjadi kelompok yang kuat dan mandiri untuk meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya.

Dengan adanya pembinaan kelompok tani diharapkan dapat membantu menggali potensi, memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif, dan memudahkan dalam mengakses informasi, pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya. Pentingnya pembinaan petani dengan pendekatan kelompok tani merupakan salah satu syarat pelancar pembangunan pertanian adalah adanya kegiatan petani yang tergabung dalam

[6] Ibid., 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelompok tani. Mengembangkan kelompok tani adalah berarti membangun keinginan, dan kepercayaan pada diri sendiri agar dapat terlibat secara aktif dalam pembangunan. Disamping itu agar mereka dapat bergerak secara metodis, berdayaguna, dan teroganisir. Suatu gerakan kelompok tani yang tidak teroganisir dan tidak mengikuti kerjasama menurut pola-pola yang maju, tidak akan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi petani.

Ada empat kriteria agar asosiasi petani itu kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (1) asosiasi harus tumbuh dari petani sendiri, (2) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala, (3) memiliki kekuatan kelembagaan formal dan (4) bersifat partisipatif. Dengan terbangunnya kesadaran seperti diatas, maka diharapkan petani mampu berperan sebagai kelompok yang kuat dan mandiri, sehingga petani dapat meningkatkan pendapatannya dan memiliki akses pasar dan akses perbankan.[7]

Desa Racikulon merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik yang berbatasan langsung dengan lahan sawah dan tambak. Sepanjang jalan menuju desa ini terdapat lahan tambak dan sawah yang terbentang luas. Setelah menempuh jarak sekitar 2,5 km dari jalan raya, pemukiman warga mulai nampak di depan mata. Luas wilayah Desa Raci Kulon adalah 257 hektar. Dengan luas lahan sawah 219.91 hektar, waduk atau danau 12.52 hektar dan lahan lainnya 24.56 Ha. Luasnya lahan pertanian yang ada, menjadikan mereka dapat bertahan hidup dengan menjadi seorang petani.

[7] Ibid., 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa yang hanya dihuni oleh 201 KK dengan jumlah laki-laki sebanyak 372 orang dan jumlah perempuan sebanyak 380 orang. Desa yang letaknya terpencil dan tidak berbatasan langsung dengan desa lain dan hanya memiliki jumlah penduduk yang sedikit, menjadi salah satu alasan peneliti dalam melakukan pendampingan untuk melihat potensi yang dimiliki oleh desa ini dalam mengorganisir kelompok tani sebagai upaya peningkatan di bidang pertanian.

Pada tahun 2011 kelompok tani di Desa Racikulon mengikuti sejumlah kegiatan, yaitu pemberantasan hama tikus, pembuatan bibit padi, pembangunan poros jalan ke sawah dan pembuatan pupuk organik. Namun, seiring dengan berjalannya waktu kelompok tani ini hampir tidak pernah ada lagi kegiatan sampai sekarang. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab dari tidak berfungsinya kelembagaan ini, diantaranya adalah kurangnya koordinasi pengurus kelompok tani terhadap anggotanya, tidak adanya rasa kepedulian dan kerjasama yang baik antara pengurus dengan anggota kelompok tani, pola pikir masyarakat yang hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Lembaga kelompok tani di Desa hanya dijadikan perantara ketika mendapat bantuan dari pemerintah. Masyarakat cenderung menggantungkan kebutuhan sawahnya pada pemerintah setempat.[8] Kelompok tani di Desa Racikulon belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Kelembagaan kelompok tani ini sudah terbentuk sejak dulu, namun kepengurusannya kurang berjalan dengan baik. Masyarakat sulit untuk diajak

[8] Wawancara dengan Bpk. Syafiq, pada tanggal 20 Maret 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi manusia yang mempunyai nilai loyalitas, kreatifitas dan produktifitas yang tinggi.[9]

Adanya kelompok ini hanya dijadikan formalitas saja dalam memenuhi program pertanian pemerintah, seperti: seminar pertanian, penyuluhan pertanian, dan lain-lain. Setelah mendapatkan wawasan tersebut, petani tidak menerapkannya secara langsung. Sehingga menyebabkan sulitnya petani untuk mengembangkan pertaniannya. Pola pikir yang ada dalam masyarakat terutama pada kelompok tani ini harus dirubah mengingat peran kelompok tani menjadi hal pokok yang perlu diperhatikan untuk memajukan usaha pertanian. Pengokohan mengenai fungsi kelompok tani dalam sektor pertanian perlu untuk dilakukan, mengingat berbagai masalah pertanian yang semakin kompleks.

B. Fokus Pendampingan

Fokus pendampingan yang ingin dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran kelompok tani dalam mensejahterakan petani?
2. Bagaimana pemanfaatan aset dan potensi kelompok tani?

C. Tujuan Pendampingan

Tujuan pendampingan yang ingin dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran kelompok tani dalam mensejahterakan petani
2. Untuk mengetahui manfaat aset dan potensi kelompok tani

[9] Wawancara dengan Bpk. Sudharmono (Kepala Desa Raci kulon), pada tanggal 22 September 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Definisi Konsep

1. Pengembangan Masyarakat

Menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah "*The process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.*"[10] Pengembangan masyarakat berhubungan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, gender, jenis kelamin, usia, dan kecatatan.

Kegiatan pengembangan masyarakat diarahkan untuk membentuk sebuah struktur masyarakat yang mencerminkan tumbuhnya semangat swadaya dan partisipasi. Pengembangan masyarakat meliputi usaha memperkukuh interaksi sosial dalam masyarakat, menciptakan semangat kebersamaan, solidaritas di antara anggota masyarakat dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara berdialog dengan didasari penuh pemahaman dan ditindaklanjuti dengan aksi sosial nyata.

Kegiatan pengembangan masyarakat biasanya berlangsung dalam sebuah kelompok, satuan sosial atau organisasi kemasyarakatan seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pengembangan masyarakat sebagai suatu proses dan aksi sosial umumnya melibatkan warga masyarakat sebagai organisator secara mandiri dalam merencanakan,

[10] Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik,* (Jakarta: Kencana, 2013), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjalankan, menentukan kebutuhan, dan memecahkan permasalahan individual maupun masyarakat.

2. Sasaran Perubahan Sosial

Perubahan sosial yang melibatkan aspek sruktural sebagai sasaran perubahan, memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mewujudkannya. Aspek ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. *Pertama,* kelompok sosial, yang meliputi perubahan yang berkaitan dengan masalah peranan kelompok, struktur komunikasi dalam kelompok, pengaruh suatu kelompok, pengaruh suatu kelompok dan keberadaan klik-klik dalam suatu kelompok. *Kedua,* organisasi, seperti perubahan yang berkaitan dengan aspek struktur organisasi, hierarki dalam organisasi, wewenang, produktivitasnya. *Ketiga,* institusi, seperti perubahan yang menyangkut bidang ekonomi, politik, agama, pendidikan dan lain-lain. *Keempat,* komunitas, seperti stratifikasi, demografi, dan kekuasaan. *Kelima,* masyarakat dunia (global), yaitu sehubungan dengan perubahan interaksi masyarakat internasional, seperti masalah modernisasi, globalisasi, serta serta alih teknologi dan pengetahuan.

Kelompok dapat dijadikan target atau perantara perubahan. Asumsi dasar yang digunakan adalah bahwa perubahan suasana akan mempengaruhi perubahan individu. Nilai, sikap, dan perilaku individu akan diubah melalui pengubahan struktur sosial atau melalui perubahan kelompok yang menjadi tempat individu berpikir dan bertindak. Metode atau strategi perubahan yang dapat digunakan adalah: *pertama*, metode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mengubah komposisi kelompok, dengan cara mengubah keanggotaannya. *Kedua*, metode yang mengubah proses atau struktur kelompok, yaitu dengan cara mengubah pola komunikasi di dalam kelompok itu, atau dengan cara meningkatkan peranan anggota kelompok dalam proses pembuatan keputusan.

Strategi perubahan yang memposisikan kelompok sebagai agen perubahan dapat digambarkan sebagai berikut.

Kelompok 1.1 Kelompok sebagai agen perubahan

Strategi yang melibatkan kelompok sebagai agen perubahan relatif lebih mudah dan cepat dilakukan daripada bila menggunakan individu sebagai agen perubahan. Namun di sisi lain, kadang kala strategi memerlukan biaya yang cukup besar karena harus melibatkan seluruh anggota kelompok dalam proses perubahan. Selain itu, sangat dimungkinkan setiap anggota kelompok memiliki persepsi atau bahkan kepentingan yang berbeda-beda. Hal inilah yang perlu mendapat perhatian.[11]

[11] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 250

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kelompok Tani

Menurut Departemen Pertanian RI, Kelompok tani didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang tani atau petani, yang terdiri atas petani dewasa, pria dan wanita, tua dan muda, yang terikat secara informal dalam suatu wilayah kelompok atas dasar keserasian dan kebutuhan bersama serta berada di lingkungan pengaruh dan pimpinan seorang kontak tani.[12]

Kelompok tani berfungsi menjadi titik penting untuk menjalankan dan menterjemahkan konsep hak petani ke dalam kebijakan, strategi, dan program yang layak dalam satu kesatuan utuh dan sebagai wadah transformasi dan pengembangan ke dalam langkah operasional. Dengan adanya suatu kelompok tani, ketua kelompok tani beserta anggotanya merupakan komponen penting tergantung pada ukuran, fungsi dari kelompok tersebut.

Pengembangan kelompok tani diarahkan untuk memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi (teknis, sosial dan ekonomi), mampu memanfaatkan kegiatan perekonomian dan mampu menghadapi resiko usaha, sehingga memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak.

[12] Sri Nuryanti dan Dewa K.S Swastika, "Peran Kelompok Tani Dalam Penerapan Teknologi Pertanian", *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 2 (Desember, 2011), 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah salah satu unsur penelitian yang sangat penting agar penulisan hasil penulisan bisa terarah. Dalam laporan penelitian nanti setidaknya ada delapan bab pembahasan yang masing-masing bab tergambarkan dibawah ini:

BAB I: PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, fokus pendampingan, tujuan pendampingan, definisi konsep dan sistematika pembahasan.

BAB II: GAMBARAN UMUM DESA RACI KULON

Dalam bab ini menjelaskan mengenai letak geografis, demografis, ekonomi, agam dan budaya, pendidikan, kesehatan, pembangunan, politik dan aset yang dimiliki.

BAB III: KAJIAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan kerangka teori yang dipakai yakni konsep perubahan sosial, konsep pengembangan masyarakat dan konsep kelompok tani.

BAB IV: JEJAK LANGKAH MENUJU PERUBAHAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai awal proses pendampingan bersama kelompok tani dengan menggunakan pendekatan berbasis aset.

BAB V: MERANCANG DAN MEWUJUDKAN MIMPI KELOMPOK TANI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai hasil dari proses pendampingan bersama kelompok tani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI: REFLEKSI HASIL PENDAMPINGAN BERSAMA KELOMPOK TANI

Dalam bab ini menjelaskan mengenai analisis kritis terhadap pendampingan bersama kelompok tani dengan menggunakan pendekatan berbasis aset.

BAB VII: PENUTUP

Dalam penutup ini menguraikan kesimpulan dari bab pertama sampai bab terakhir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id